



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/363/436.1.2/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA
SURABAYA TAHUN 2025

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Walikota dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Walikota tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Walikota harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Surabaya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Surabaya Tahun 2025.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Wali Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 100.3.3.3/363/436.1.2/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2025

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH			
1.	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		V		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Wilayah Kota Surabaya		V			Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		V		Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
4.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya Di Kota Surabaya			V		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH			
5.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya			V		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi Online		V			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
7.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah			V		Badan Pendapatan Daerah	
8.	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Karang Pilang dan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya		V			Badan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
9.	Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dan Jaringan Pelayanan Koperasi yang Berkedudukan Di Wilayah Kota Surabaya		V			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH			
10.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
11.	Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat		V			Badan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
12.	Kader Surabaya Hebat		V			Badan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
13.	Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Smp/Mts) Atau Sederajat		V			Dinas Pendidikan	Tanty
14.	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		V			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
15.	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		V			Badan Pendapatan Daerah	
16.	Peninjauan Tarif dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Umum		V			Dinas Kesehatan	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH			
17.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi Online			V		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
18.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun			V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
19.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025			V		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
20.	Peninjauan Tarif Dan Penambahan Detail Rincian Objek Pada Retribusi Jasa Usaha		V			Badan Pendapatan Daerah	
21.	Peraturan Wali Kota Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Nelayan		V			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
22.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yang Bekerja Sebagai Petani		V			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH			
23.	Pencegahan, Pelaporan, Dan Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya		V			Inspektorat	
24.	Tata Cara Pemutakhiran Dan Pemanfaatan Data Warga Untuk Pemberian Intervensi Kepada Warga Kota Surabaya		V			Dinas Komunikasi dan Informatika	
25.	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah		V			Badan Pendapatan Daerah	
26.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		V			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
27.	Pedoman Audit Investigatif		V			Inspektorat	
28.	Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih		V			Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
29.	Pengawasan Koperasi		V			Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
30.	Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH			
31.	Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			V		Badan Pendapatan Daerah	
32.	Pembangunan Rumah Susun Umum Milik di Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Surabaya		V			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
33.	Pedoman Teknis Pemanfaatan Ruang		V			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
34.	Tata Cara Pelayanan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		V			Dinas Lingkungan Hidup	
35.	Penyelenggaraan Jaringan Utilitas		V			Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI